



LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI SEKAYU**

DESEMBER 2019

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	5
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	10
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	14
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	16
BAB IV	17
PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan	17
4.2. Rekomendasi	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara

mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
 - Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sekayu.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada

rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan.

Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK
menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparasi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh data bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar pendidikan SLTA dengan persentase sebesar 42% (empat puluh dua persen).

Tabel 4. Tingkat pendidikan responden

Nomor	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	-	-
2	SD	1	2
3	SMP	10	20
4	SLTA	21	42
5	Diploma	-	0
6	S1	14	28
7	Pasca Sarjana	1	2
8	Tidak mencantumkan pendidikan terakhir	3	6
Jumlah		50	100

Pekerjaan responden

Dari jenis pekerjaan responden diketahui bahwa responden terbesar pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan dengan kategori “pegawai swasta” yaitu sebesar 34% (tiga puluh empat persen).

Tabel 5. Jenis pekerjaan responden

Nomor	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	3	6
2	TNI/Polri	7	14
3	Pegawai Swasta	17	34
4	Wiraswasta	6	12
5	Petani/Nelayan	1	2
6	Pedagang	2	4

7	Pelajar/Mahasiswa	-	0
8	Lainnya	14	28
Jumlah		50	100

Domisili responden

Berdasarkan hasil survei terhadap 50 (lima puluh) responden, diperoleh data bahwa 52% (lima puluh dua persen) dari responden yang tidak mencantumkan domisilinya, dan yang berdomisili di wilayah Kota Sekayu yaitu sebanyak 30% (tiga puluh) persen.

Tabel 6. Domisili Responden

Nomor	Domisili	Frekuensi	%
1	Wilayah Kota Sekayu	15	30
2	Wilayah diLuar Sekayu	9	18
3	Tidak Mencatumkan Alamat	26	52
Jumlah		50	100%

Kelompok usia responden

Jika dilihat dari usia responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan, mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun sampai dengan 40 tahun, dimana persentase tertinggi yaitu sebesar 44% (empat puluh empat persen) berada pada usia 18 (delapan belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.

Tabel 7. Usia responden

Nomor	Usia	Frekuensi	%
1	18-30	22	44
2	31-40	9	18
3	41-50	5	10
4	51-60	-	0
5	61>	-	0
6	Tidak mencantumkan usia	14	28
Jumlah		50	100

Layanan yang digunakan

Terkait dengan jenis layanan yang digunakan oleh responden, dari 50 (lima puluh) responden, sebesar 46% (empat puluh enam persen) menggunakan layanan hukum. Dengan demikian disimpulkan layanan hukum merupakan layanan yang paling banyak digunakan.

Tabel 8. Jenis layanan yang dipergunakan responden

Nomor	Jenis Layanan	Frekuensi	%
1	Pidana	11	22
2	Perdata	11	22
3	Hukum	19	38
4	Umum	9	18
	Jumlah	50	100

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

Indikator Manipulasi Peraturan

Berdasarkan hasil survei IPK khususnya pada indikator Manipulasi Peraturan, dari 50 (lima puluh) responden yang disurvei dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar 3,94 (tiga koma sembilan empat). Dengan demikian, kinerja Pengadilan Negeri Sekayu bersih dari korupsi dalam bentuk manipulasi peraturan.

Tabel 9. Indeks pada indikator manipulasi peraturan

Nomor	Skala	Frekuensi	%
1	4	47	94
2	3	3	6
3	2	-	0
4	1	-	0
	Jumlah	50	100

Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Berdasarkan hasil survei IPK khususnya pada indikator Penyalahgunaan Jabatan, dari 50 (lima puluh) responden yang disurvei dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4 diperoleh nilai interval/indeks sebesar 4

(empat). Dengan demikian, kinerja Pengadilan Negeri Sekayu bersih dari korupsi dalam bentuk Penyalahgunaan jabatan.

Tabel 10. Indeks pada indikator penyalahgunaan jabatan

Nomor	Skala	Frekuensi	%
1	4	50	100
2	3	-	0
3	2	-	0
4	1	-	0
Jumlah		50	100

Indikator Menjual Pengaruh

Berdasarkan hasil survei IPK khususnya pada indikator Menjual Pengaruh, dari 50 (lima puluh) responden yang disurvei dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar 3,66 (tiga koma enam enam). Dengan demikian, kinerja Pengadilan Negeri Sekayu bersih dari korupsi dalam bentuk menjual pengaruh.

Tabel 11. Indeks pada indikator menjual pengaruh

Nomor	Skala	Frekuensi	%
1	4	43	86
2	3	1	2
3	2	2	4
4	1	4	8
Jumlah		50	100

Indikator Transaksi Biaya

Berdasarkan hasil survei IPK khususnya pada indikator Transaksi Biaya, dari 50 (lima puluh) responden yang disurvei dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar 3,56 (tiga koma lima enam). Dengan demikian, kinerja Pengadilan Negeri Sekayu bersih dari korupsi terkait dengan indikator transaksi biaya.

Tabel 12. Indeks pada indikator transaksi biaya

Nomor	Skala	Frekuensi	%
1	4	40	80
2	3	3	6
3	2	2	4
4	1	5	10
Jumlah		50	100

Indikator Biaya Tambahan

Berdasarkan hasil survei IPK khususnya pada indikator Biaya Tambahan, dari 50 (lima puluh) responden yang disurvei dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar 3,34 (tiga koma tiga empat). Dengan demikian, kinerja Pengadilan Negeri Sekayu bersih dari korupsi terkait dengan indikator biaya tambahan.

Tabel 13. Indeks pada indikator biaya tambahan

Nomor	Skala	Frekuensi	%
1	4	39	78
2	3	-	0
3	2	-	0
4	1	11	22
Jumlah		50	100

Indikator Hadiah

Berdasarkan hasil survei IPK khususnya pada indikator Hadiah, dari 50 (lima puluh) responden yang disurvei dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar 3,36 (tiga koma tiga enam). Dengan demikian, kinerja Pengadilan Negeri Sekayu bersih dari korupsi terkait dengan indikator hadiah.

Tabel 14. Indeks pada indikator hadiah

Nomor	Skala	Frekuensi	%
1	4	38	76
2	3	1	2
3	2	2	4
4	1	9	18

Jumlah	50	100
---------------	-----------	------------

Indikator Transparansi Biaya

Berdasarkan hasil survei IPK khususnya pada indikator Transparansi Biaya, dari 50 (lima puluh) responden yang disurvei dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar 3,6 (tiga koma enam). Dengan demikian, kinerja Pengadilan Negeri Sekayu bersih dari korupsi terkait dengan transparansi biaya.

Tabel 15. Indeks pada indikator transparansi biaya

Nomor	Skala	Frekuensi	%
1	4	42	84
2	3	2	4
3	2	-	0
4	1	6	12
Jumlah		50	100

Indikator Percaloan

Berdasarkan hasil survei IPK khususnya pada indikator Percaloan, dari 50 (lima puluh) responden yang disurvei dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar 4 (empat). Dengan demikian, kinerja Pengadilan Negeri Sekayu bersih dari korupsi terkait dengan indikator Percaloan.

Tabel 16. Indeks pada indikator percaloan

Nomor	Skala	Frekuensi	%
1	4	50	100
2	3	-	0
3	2	-	0
4	1	-	0
Jumlah		50	100

Indikator Perbuatan Curang

Berdasarkan hasil survei IPK khususnya pada indikator Perbuatan Curang, dari 50 (lima puluh) responden yang

disurvei dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar 3,92 (tiga koma sembilan dua). Dengan demikian, kinerja Pengadilan Negeri Sekayu bersih dari korupsi terkait dengan indikator Perbuatan curang.

Tabel 17. Indeks pada indikator perbuatan curang

Nomor	Skala	Frekuensi	%
1	4	47	94
2	3	2	4
3	2	1	2
4	1	-	0
Jumlah		50	100

Indikator Transaksi Rahasia

Berdasarkan hasil survei IPK khususnya pada indikator Transaksi Rahasia, dari 50 (lima puluh) responden yang disurvei dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4, diperoleh nilai interval/indeks sebesar 4 (empat). Dengan demikian, kinerja Pengadilan Negeri Sekayu bersih dari korupsi terkait dengan indikator transaksi rahasia.

Tabel 18. Indeks pada indikator transaksi rahasia

Nomor	Skala	Frekuensi	%
1	4	50	100
2	3	-	0
3	2	-	0
4	1	-	0
Jumlah		50	100

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Berdasarkan hasil survei indeks persepsi korupsi pada 10 (sepuluh) indikator diatas, diperoleh nilai interval/nilai indeks masing-masing indikator sebagaimana dincantumkan pada tabel dibawah ini. Setelah dilakukan perhitungan terhadap nilai indeks tersebut diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sekayu yaitu 3,74 (tiga koma tujuh empat).

**Tabel 19. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Sekayu**

NO	Indeks	NRR Tertimbang	Konversi
1	3,94	0,39	9,85
2	4,00	0,40	10,00
3	3,66	0,37	9,15
4	3,56	0,36	8,90
5	3,34	0,33	8,35
6	3,36	0,34	8,40
7	3,60	0,36	9,00
8	4,00	0,40	10,00
9	3,92	0,39	9,80
10	4,00	0,40	10,00
Jumlah		3,74	93,45

NRR Tertimbang sebesar 3,74 (tiga koma tujuh empat) tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **93,45**.

Tabel 20.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sekayu

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor IPK, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sekayu

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

Nomor	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sekayu
1	Agar komitmennya selalu dijaga dengan baik
2	Agar pelayanannya dipertahankan lebih baik lagi
3	Agar selalu menjaga sarana dan prasarana yang ada

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sekayu diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sekayu. memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3.74 **atau** masuk pada kategori **Bersih dari korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,94
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,66
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,56
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,34
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,36
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,60
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,92
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil IPK pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sekayu Bulan Desember Tahun 2019, menunjukkan tidak ada indikator yang memiliki indeks dibawah 3,26 (tiga koma dua enam), secara garis besar pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sekayu masuk pada persepsi **Bersih dari korupsi**.

PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Satuan kerja : Pengadilan Negeri Sekayu
 Alamat : Jalan Merdeka LK. VI Nomor 485 Sekayu

Responden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Keterangan
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	1	1	1	1	1	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	1	4	1	4	4	4	
8	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	
9	4	4	1	1	1	1	1	4	4	4	
10	4	4	1	1	1	1	1	4	4	4	
11	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	1	1	1	4	1	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	
35	4	4	2	4	1	4	4	4	4	4	
36	3	4	4	2	4	4	4	3	4	4	
37	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	

38	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	1	1	4	4	4	4	
41	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43	4	4	3	3	1	3	3	4	2	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
45	4	4	4	1	1	2	4	4	3	4	
46	4	4	2	3	1	1	1	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah	197	200	183	178	167	168	180	200	196	200	
Indeks	3,94	4,00	3,66	3,56	3,34	3,36	3,60	4,00	3,92	4,00	
NRR Tertimbang	0,39	0,40	0,37	0,36	0,33	0,34	0,36	0,40	0,39	0,40	3,74
Konversi	9,85	10,00	9,15	8,90	8,35	8,40	9,00	10,00	9,80	10,00	93,45